

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pemilihan umum, terutama pemilihan presiden (Pilpres), merupakan cara utama bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya, sebagai bentuk nyata dari penerapan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang dijalankan di negara Indonesia, Pilpres menjadi alat penting yang menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa. Pemilu bukan hanya rutinitas politik setiap lima tahun, tapi proses pembelajaran politik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kualitas demokrasi suatu negara bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, merasakan, dan menjalankan hak politiknya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat, khususnya kalangan muda yang baru memiliki hak pilih, menjadi penanda penting dalam menilai tingkat kematangan politik sebuah bangsa (Maulana 2019).

Pemilih pemula, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah warga negara yang pertama kali memiliki hak pilih dalam pemilu, biasanya berusia antara 17 hingga 21 tahun atau belum lama menikah. Berdasarkan data KPU tahun 2024, jumlah pemilih pemula di Indonesia mencapai lebih dari 52% dari total pemilih nasional. Angka ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki suara yang sangat berpengaruh terhadap hasil Pilpres. Namun, potensi ini tidak selalu diiringi oleh kesiapan dan pemahaman politik yang memadai. Banyak pemilih pemula belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem pemerintahan, lembaga politik, fungsi pemilu, sampai kebijakan calon pemimpin yang akan dipilih. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa ada kecenderungan pemilih untuk memilih secara emosional, pragmatis, atau bahkan apatis terhadap proses demokrasi.



Gambar 1.1 Data pemilih muda tahun 2024

Sumber : w.w.w tempo.co

Infografik tersebut menggambarkan komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Indonesia 2024 yang menunjukkan dominasi pemilih dari kalangan usia muda. Dari total 204.807.222 pemilih yang terdaftar, sekitar 51,93% atau lebih dari 106 juta orang berada pada rentang usia 17 hingga 40 tahun. Data ini menegaskan bahwa generasi muda yang mencakup Generasi Z dan milenial memiliki proporsi terbesar dibandingkan kelompok usia lainnya seperti Generasi X dan baby boomer. Visualisasi dalam bentuk diagram lingkaran turut memperlihatkan distribusi persentase tiap generasi, yang memperkuat argumen bahwa pemilih muda menjadi kekuatan signifikan dalam menentukan arah hasil pemilu. Oleh karena itu, dinamika politik, strategi kampanye, serta isu-isu yang diangkat dalam Pemilu 2024 cenderung berorientasi pada preferensi dan kepentingan kelompok usia muda sebagai pemilih mayoritas.

Data empiris dari pelaksanaan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa jumlah pemilih muda di Desa Banyumurni mencapai 487 orang. Dari jumlah tersebut, 399 orang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi mencapai 82 persen, yang dalam studi perilaku politik dianggap sebagai tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Tingkat partisipasi ini menempatkan pemilih

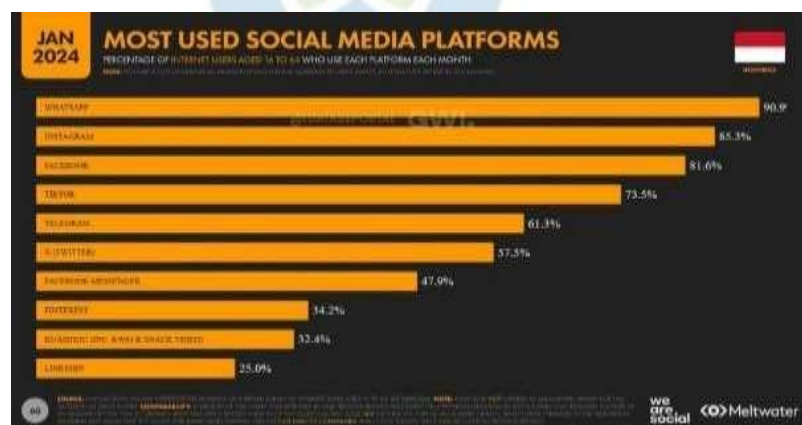
muda sebagai salah satu kelompok yang memberikan kontribusi besar dalam struktur pemilih di desa tersebut.

Data di atas menunjukkan dua implikasi penting. Pertama, tingginya partisipasi pemilih muda menunjukkan bahwa kelompok usia ini memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dan responsif terhadap momen pemilihan. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa pemilih muda cenderung tidak aktif atau tidak memiliki orientasi politik yang jelas. Kedua, kontribusi 399 suara dari kelompok ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam memengaruhi hasil pemilu di tingkat lokal. Dari sudut pandang perilaku pemilih, dominasi suara dari kelompok usia produktif ini menjadi indikator penting bagi calon pemimpin dan penyelenggara pemilu dalam merancang cara komunikasi dan strategi membangun partisipasi.

Data tersebut memperkuat pandangan bahwa partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga faktor psikologis dan sosial seperti pemahaman politik, literasi politik, pengaruh lingkungan sosial, dan efektivitas sosialisasi politik. Dengan demikian, data fakta mengenai tingginya partisipasi pemilih muda di Desa Banyumurni memberikan dasar penelitian yang kuat untuk menganalisis bagaimana pemahaman politik memengaruhi partisipasi mereka dalam Pemilu 2024. Data tersebut secara tidak langsung memperkuat posisi pemilih muda sebagai pelaku kunci dalam dinamika politik lokal yang mampu memengaruhi kearah suara secara signifikan.

Pemilih pemula dipilih sebagai subjek penelitian karena kelompok ini adalah generasi pertama yang secara resmi mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka sedang dalam proses peralihan menuju kedewasaan politik, di mana nilai, sikap, dan tindakan mereka dalam hal politik masih dalam tahap pembentukan. Dari data yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024, jumlah pemilih pemula di Indonesia mencapai lebih dari 52% dari total pemilih secara nasional. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh pemilih

pemula terhadap hasil Pemilihan Presiden 2024. Selain jumlahnya yang cukup besar, pemilih pemula juga mewakili masa depan demokrasi Indonesia. Karena itu, penting untuk memahami tingkat kesadaran politik mereka agar dapat mengetahui sejauh mana kemampuan generasi muda dalam mengambil keputusan politik secara rasional dan bertanggung jawab. Pemahaman politik dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan seseorang dalam menganalisis fenomena politik di sekitarnya. Seorang individu yang memiliki pemahaman politik tinggi biasanya cenderung berpikir kritis terhadap kebijakan publik, memahami peran pemerintah dan lembaga politik, serta aktif dalam proses demokrasi. Sebaliknya, seseorang dengan pemahaman politik rendah lebih mudah terpengaruh oleh isu dangkal, kampanye negatif, atau bahkan politik uang yang sering terjadi dalam pemilu di negara berkembang. Dalam konteks Pilpres 2024, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar terhadap cara pemilih pemula mendapatkan dan memproses informasi politik (gustam 2024).



Gambar 1.2 Data pengguna media sosial tahun 2024

Sumber : w.w.w indonesiana.id

Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi sumber utama informasi politik bagi generasi muda. Di satu sisi, hal ini memudahkan akses informasi secara cepat dan terbuka, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dengan adanya penyebaran hoaks, disinformasi,

dan propaganda digital yang sulit dicari kebenarannya. Pemilih pemula yang belum memiliki kemampuan literasi politik dan digital yang kuat bisa terjebak dalam aliran informasi yang menyesatkan, sehingga preferensi politik mereka bisa terbentuk bukan dari pertimbangan rasional, melainkan karena opini viral dan tren media sosial (zainudin 2024). Desa Banyumurmi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, adalah wilayah pedesaan yang menarik untuk diteliti karena mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia secara umum. Kebanyakan penduduk berprofesi sebagai petani, buruh, dan pengusaha kecil. Tingkat pendidikan mereka beragam. Kondisi ini memengaruhi cara pemilih pemula di sini memahami politik. Mereka cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi.

Secara ideal, pemilih pemula diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan partisipatif. Mereka seharusnya memahami isu-isu politik, menilai visi-misi calon pemimpin, serta menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan emosional. Namun, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pemilih pemula yang belum memiliki pemahaman politik yang memadai. Sebagian besar dari mereka mudah terpengaruh oleh tren media sosial, isu-isu yang bersifat sensasional, serta opini publik yang tidak terverifikasi. Di daerah pedesaan seperti Desa Banyumurmi, kondisi ini semakin kompleks karena keterbatasan akses informasi, pengaruh budaya paternalistik, serta minimnya pendidikan politik di lingkungan formal maupun informal. Ketimpangan antara kondisi ideal dan realitas ini menjadikan pemilih pemula kelompok yang rentan terhadap pengaruh eksternal dalam menentukan pilihan politiknya.

Di masyarakat pedesaan, sumber informasi politik biasanya berasal dari keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kegiatan sosial, bukan dari media digital atau media formal. Hubungan antarwarga di Desa Banyumurmi masih kuat, serta tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini politik. Perilaku politik pemilih pemula di sini

tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan individu, tetapi juga oleh budaya, lingkungan sosial, dan norma yang berlaku. Misalnya, dalam lingkungan yang masih berbasis paternalistik, keputusan seseorang sering kali dipengaruhi oleh tokoh yang dihormati, seperti ketua desa atau ulama. Akibatnya, pola pilihan mereka mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada pemahaman politik yang mendalam, melainkan karena pengaruh sosial dan budaya patronase.

Selain itu, pendidikan juga berpengaruh besar terhadap pemahaman politik pemilih pemula. Pendidikan formal di sekolah menengah atas atau lembaga keagamaan seharusnya menjadi tempat membentuk nilai demokrasi dan pengetahuan politik (Mardatila 2023). Namun, di lapangan, materi politik di sekolah masih lebih fokus pada teori, tidak banyak menyentuh aspek praktis seperti pemilu, kampanye, atau analisis kebijakan. Akibatnya, banyak pemuda memandang politik sebagai hal yang tidak terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan aktivitas keagamaan juga membantu meningkatkan kesadaran politik. Namun, tidak semua pemuda di Desa Banyumurmi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Faktor ekonomi, waktu, dan motivasi pribadi memengaruhi partisipasi mereka. Hal ini menyebabkan pemahaman politik pemilih pemula di sini tidak merata dan berbeda-beda.

Pemilih pemula di Banyumurmi mencerminkan generasi muda pedesaan yang tinggal di tengah perubahan sosial yang cepat. Mereka berada di tengah-tengah pergeseran antara budaya tradisional dan pengaruh modernisasi digital. Di satu sisi, mereka masih melestarikan nilai-nilai kebersamaan yang kuat, namun di sisi lain, mereka juga terpengaruh oleh dinamika politik nasional melalui media sosial. Hal ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang menarik untuk diteliti, karena perilaku politik mereka tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori-teori lama, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks mereka. Penelitian ini bertujuan menggali pemahaman pemilih pemula di Desa

Banyumurmi tentang konsep politik, bagaimana mereka membentuk keinginan politik, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam Pilpres 2024.

Hasilnya juga bisa menunjukkan seberapa baik pendidikan politik dan penyebaran informasi politik berjalan di tingkat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memberi manfaat baik secara akademik maupun secara praktis bagi para pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai peran lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media lokal dalam membentuk kesadaran politik remaja. Pendidikan politik yang baik di tingkat lokal dapat menciptakan generasi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat relevan di tengah berbagai tantangan demokrasi seperti politik uang, polarisasi, dan keberadaan informasi yang tidak benar selama masa kampanye Pilpres 2024.



Gambar 1.3 Tingkat partisipasi politik tahun 2019 dan tahun 2024

Sumber : instagram @bawaslusulsel

Data di atas menunjukkan adanya lonjakan dalam tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan di negara, dari 78,2% pada pemilu 2019 menjadi 80,6% pada pemilu 2024. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap urusan politik, tetapi juga menunjukkan bahwa lebih banyak warga yang menyadari pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak. Dalam konteks pemilihan presiden pada

tahun 2024, adanya momentum politik yang lebih aktif serta akses terhadap informasi politik lebih luas memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama generasi muda dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu politik. Peningkatan partisipasi ini sangat relevan bagi kelompok pemilih pemula yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Pemilih pemula adalah kategori usia yang paling cepat beradaptasi dengan informasi politik, baik melalui platform digital, suasana sekolah, maupun interaksi sosial di komunitas. Peningkatan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula memberikan kontribusi signifikan terhadap naiknya angka partisipasi pemilu secara keseluruhan. Saat ini pemilih pemula mulai memahami fungsi pemilu, tanggung jawab presiden serta efek dari keputusan-keputusan politik terhadap kehidupan mereka. Maka yang memotivasi mereka untuk hadir pada pemungutan suara dan menjalankan kewajiban mereka untuk menggunakan hak pilihnya menjadi semakin tinggi. Pemahaman politik yang matang bisa mendorong seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak. Pemilih yang memahami politik dengan baik cenderung memilih berdasarkan rencana kerja, integritas, dan penampilan calon, bukan hanya karena faktor emosional atau tekanan dari sekitar. Oleh karena itu, memahami sejauh mana pemilih pemula di Banyumurmi memahami politik dapat menunjukkan kualitas demokrasi di tingkat masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pemahaman politik, penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan hubungan antara tingkat pemahaman politik dan tindakan politik pemilih pemula dalam Pilpres 2024. Kajian ini juga bisa menjadi dasar dalam merancang strategi pendidikan politik dan literasi demokrasi yang efektif, agar meningkatkan kualitas partisipasi politik seluruh masyarakat, terutama generasi muda pedesaan (Ivanna 2025).

Kondisi sosial di Desa Banyumurmi yang masih memiliki nilai-nilai tradisional menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam memahami cara masyarakatnya berpartisipasi dalam politik. Di lingkungan pedesaan, keputusan yang diambil biasanya didasarkan pada rasa

persaudaraan dan kerja sama yang kuat. Akibatnya, pilihan politik seseorang tidak hanya terbentuk secara rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh opini dari keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat, yang sering menjadi acuan utama dalam memilih tokoh politik. Dengan demikian, pemahaman politik bagi orang yang baru mulai berpartisipasi dalam pemilu di lingkungan seperti ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial yang membentuk cara mereka melihat politik. Selain pengaruh dari lingkungan sosial, faktor ekonomi juga memengaruhi pemahaman politik dan partisipasi pemilih pemula. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah biasanya memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi politik yang lengkap, karena banyak faktor seperti waktu, fasilitas, atau kebutuhan pokok yang lebih mendesak. Pemilih dari keluarga menengah ke bawah terkadang lebih mudah terpengaruh oleh manfaat yang ditawarkan, seperti bantuan sosial atau janji-janji ekonomi dari kandidat politik. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman politik yang baik, pemilih pemula berisiko terjebak dalam praktik politik yang bersifat pragmatis.

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi memberikan kesempatan bagi pemilih pemula untuk lebih aktif dalam berdiskusi politik. Dengan akses ke berita politik nasional melalui media sosial, mereka bisa membandingkan berbagai pandangan dari calon-calon politik. Namun, kemampuan untuk menilai dan menganalisis informasi secara kritis menjadi tantangan. Banyak pemilih pemula hanya menerima informasi dari satu sumber tanpa memverifikasi kebenarannya, sehingga terbentuk bias politik yang tidak didasarkan pada fakta (Qoryna 2022). Oleh karena itu, literasi digital dalam hal politik adalah komponen penting untuk meningkatkan pemahaman politik generasi muda, terutama di daerah pedesaan yang kini mulai terhubung dengan dunia digital. Peran sekolah dalam membentuk pemahaman politik bagi pemilih pemula juga sangat penting. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa diperkenalkan pada konsep dasar sistem politik, hak serta kewajiban warga negara, dan proses pemilihan umum. Namun, pendekatan yang masih

bersifat teoretis seringkali tidak cukup untuk membangun kesadaran politik yang kritis. Diperlukan metode pembelajaran yang lebih praktis, seperti simulasi pemilu, diskusi politik, atau kegiatan organisasi siswa, agar bisa menumbuhkan minat terhadap isu-isu publik dan demokrasi.

Sementara itu, tokoh agama di desa-desa seperti Desa Banyumurmi memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara masyarakat, termasuk generasi muda, memandang politik. Dari sudut pandang sosiologis, tokoh agama sering dipercaya sebagai figur yang bisa memberi nasihat moral dan arahan sosial, termasuk dalam hal politik. Jika tokoh agama mengerti politik dengan baik dan bersikap netral, mereka bisa menjadi pengajar politik yang positif. Tapi bila mereka terlalu pihak tertentu, pemilih pemula bisa terpengaruh oleh pandangan politik yang satu pihak tanpa pemahaman mendalam. Media lokal juga berperan penting dalam menyebarkan informasi politik di desa. Di tingkat pedesaan, media lokal seperti radio komunitas, grup WhatsApp warga, atau pertemuan di desa menjadi sarana utama menyebar berita politik. Namun, keterbatasan dalam memverifikasi kebenaran dan kemampuan jurnalistik di tingkat lokal sering kali membuat informasi yang diberitakan kurang akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilihat seberapa besar media lokal dalam membentuk pemahaman politik pemilih pemula di Banyumurmi. Dalam konteks nasional, fenomena politik identitas yang muncul pada Pilpres 2019 memberikan pelajaran penting bagi pemilih pemula.

Polarisasi berdasarkan agama dan etnis yang terjadi menunjukkan masih banyak masyarakat yang memandang politik secara emosional, bukan secara rasional. Dalam Pilpres 2024, tantangan ini tetap ada, terutama bagi pemilih muda yang rentan terpengaruh oleh framing politik identitas di media sosial (Nadia 2025). Maka, penelitian tentang pemahaman politik pemilih pemula juga harus mempertimbangkan cara mereka menanggapi isu-isu yang sensitif seperti agama, suku, dan ideologi. Dari sudut pandang psikologi politik, usia remaja akhir (17–21 tahun) adalah masa penting dalam membentuk identitas politik. Di usia ini, seseorang mulai memiliki

pandangan tentang keadilan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Namun, karena pengalaman politik mereka masih sedikit, pandangan mereka sering dipengaruhi oleh pihak luar, seperti orang tua atau kelompok sosial. Tingkat kematangan mental dan emosional mereka juga menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh apa pemahaman politik bisa memengaruhi tindakan mereka saat memilih di Banyumurmi.

Secara teoritis literasi politik adalah kemampuan seseorang untuk memahami sistem politik, lembaga pemerintahan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan cara seseorang memandang politik melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, teman, dan media. Partisipasi politik adalah tindakan aktif warga negara dalam membantu mengambil keputusan bersama. Ketiga teori ini menjelaskan bahwa pemahaman politik sangat memengaruhi tingkat partisipasi seseorang, termasuk pemilih pemula.

Partisipasi politik pemilih pemula juga dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang efektivitas sistem politik. Jika mereka merasa suara mereka tidak akan ada dampaknya, mereka cenderung tidak tertarik mengikuti pemilu. Sebaliknya, jika mereka percaya setiap suara memiliki arti, mereka akan lebih termotivasi untuk ikut memilih. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman, informasi, dan interaksi sosial di sekitar mereka. Maka, penting untuk mengetahui bagaimana pemilih pemula di Banyumurmi memandang pentingnya partisipasi dalam Pilpres 2024.

Fenomena politik uang yang masih terjadi di beberapa daerah pedesaan juga menjadi hambatan dalam membentuk pemahaman politik yang sehat. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mendorong mentalitas transaksional di kalangan pemilih, termasuk pemilih muda. Jika hal ini terus berlangsung, maka generasi muda akan kehilangan pedoman nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai apakah pemilih pemula di Banyumurmi memiliki kesadaran terhadap bahaya politik uang serta sejauh mana pemahaman politik mereka dapat menjadi pelindung terhadap praktik semacam itu.

Penelitian ini juga akan mengevaluasi seberapa besar kontribusi kebijakan pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih pemula. KPU, Bawaslu, serta lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pemilih pemula, memahami proses demokrasi secara lengkap. Program pendidikan pemilih yang diselenggarakan di sekolah atau desa seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran politik dan mengurangi tingkat golput di kalangan generasi muda (Yusuf et al. 2024).

Selain itu, penting pula untuk memahami peran gender dalam konteks pemilih pemula. Perempuan muda sering menghadapi hambatan sosial dan budaya dalam menyampaikan pendapat politiknya. Di masyarakat tradisional seperti Banyumurmi, partisipasi perempuan dalam kegiatan politik masih terbatas karena norma yang menempatkan perempuan di ranah rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melihat apakah ada perbedaan pemahaman politik antara pemilih pemula laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana pemahaman politik terbentuk serta mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula di Desa Banyumurmi.

Sebagian besar penelitian mengenai pemilih pemula fokus pada aspek pendidikan politik di daerah perkotaan dan lingkungan sekolah yang menerapkan program sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran siswa. Namun, masih sedikit penelitian yang secara nyata mengeksplorasi bagaimana tingkat pemahaman politik memengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di daerah pedesaan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh pemahaman politik terhadap partisipasi pemilih pemula di Desa Banyumurmi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan presiden 2024.

Akhirnya, melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara pemahaman politik dan partisipasi pemilih pemula dalam

Pilpres 2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam studi ilmu politik, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat masyarakat. Pemilih pemula bukan hanya penerus demokrasi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menentukan masa depan bangsa.

B. Rumusan masalah

Dari beberapa pemaparan di atas terkait pengaruh pemahaman politik pemilih pemula terhadap partisipasi politik pada pilpres 2024 di desa banyumurni kecamatan cibitung kabupaten sukabumi, ada beberapa pengidentifikasian sebuah masalah. Oleh karena itu, yang akan menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh pemahaman politik terhadap partisipasi dan tindakan pemilih pemula pada pilpres 2024?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pemahaman politik pemilih muda di Desa Banyumurni?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan beberapa poin yaitu :

1. untuk menganalisis bagaimana pemahaman politik mereka mempengaruhi partisipasi dan cara mereka dalam memilih pada pilpres 2024
2. untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman politik mereka di daerah tersebut.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara praktis

Secara nyata, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk membuat program sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang lebih efektif, terutama untuk pemilih pemula di daerah pedesaan. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini

bisa jadi bahan acuan untuk memperkuat pembelajaran tentang kewarganegaraan dan pendidikan politik di sekolah menengah atas. Data dan temuan penelitian ini bisa menjadi bahan bagi guru dalam merancang metode pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis dan memahami pentingnya partisipasi dalam politik kebangsaan. Manfaat lainnya adalah bagi organisasi kepemudaan seperti karang taruna di Desa Banyumurmi. Penelitian ini bisa membantu mereka memahami pentingnya pendidikan politik bagi anggotanya, serta menjadi dasar dalam membangun kegiatan edukatif yang meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda.

2. Secara akademis

Penelitian ini bermanfaat secara akademis pertama kali karena berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik, terutama dalam mempelajari perilaku politik dan partisipasi pemilih. Dengan meneliti pemilih pemula di Desa Banyumurmi, penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana pemahaman politik terbentuk di lingkungan pedesaan, yang memiliki karakteristik sosial berbeda dibandingkan masyarakat perkotaan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya studi politik lokal serta memperluas wawasan akademis dalam memahami demokrasi dari tingkat bawah masyarakat. Manfaat akademis lainnya adalah memperkaya literatur mengenai literasi politik atau pemahaman politik pada generasi muda. Penelitian tentang literasi politik di Indonesia masih terbatas dan sering fokus pada masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris penting dengan menganalisis dinamika pemahaman politik di desa, yang dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa depan. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi bidang pendidikan politik dalam lingkungan akademik.

E. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan logis antara pemahaman politik sebagai faktor yang memengaruhi dan perilaku pemilih pemula sebagai hal yang terpengaruh dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Secara umum, pemahaman politik dipercaya sangat berpengaruh terhadap cara seseorang bertindak dan bersikap dalam kegiatan politik, termasuk dalam proses menggunakan hak memilih. Dalam konteks Desa Banyumurmi, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perbedaan tingkat pemahaman politik di antara pemilih pemula membentuk tindakan mereka dalam pemilihan presiden.

Teori yang menjadi dasar dalam kerangka berpikir ini adalah Teori Literasi Politik (*Political Literacy Theory*) Milner (2002), literasi politik mencerminkan sejauh mana seseorang memahami sistem politik, tokoh politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semakin tinggi literasi politik seseorang, semakin baik kemampuannya dalam menilai isu politik secara rasional dan mengambil keputusan yang matang dalam proses demokrasi. Dalam penelitian ini, literasi politik dianggap sebagai bagian utama dari pemahaman politik yang menentukan sampai sejauh mana pemilih pemula memahami arti, fungsi, dan tujuan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Selain itu, tingkat pemahaman politik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses pembelajaran dan interaksi sosial yang terus-menerus (Hermanto et al. 2025)

Teori Sosialisasi Politik (*Political Socialization Theory*) menurut Almond & Verba (1963), sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang memperoleh nilai, sikap, dan pandangan politik melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan lingkungan masyarakat (Firdaus n.d.). mBagi pemilih yang baru mulai terlibat, keluarga dan lembaga pendidikan menjadi dua agen utama yang membentuk pandangan politik awal mereka. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman politik yang dimiliki dengan tindakan politik yang diambil. Oleh karena itu, pemahaman politik tidak hanya bergantung pada tingkat

pendidikan formal, tetapi juga pada frekuensi interaksi sosial dan paparan terhadap isu-isu politik. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Banyumurmi, proses sosialisasi politik masih banyak dipengaruhi oleh budaya setempat, nilai tradisional, dan tokoh masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika yang unik, di mana pemilih muda mungkin mengalami konflik antara nilai tradisional yang cenderung tidak terlibat aktif dalam politik dengan pengaruh informasi dari media sosial. Dengan menggunakan teori sosialisasi politik, penelitian ini berupaya memahami bagaimana interaksi antara budaya lokal dan pengaruh digital membentuk pemahaman politik generasi muda, serta bagaimana hasil dari pemahaman tersebut tercermin dalam tindakan memilih mereka.

Teori yang menjadi dasar konsep adalah Teori Partisipasi Politik, yang diajukan oleh Huntington dan Nelson pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah cara warga negara terlibat dalam berbagai kegiatan politik untuk membantu mengambil keputusan publik (nur rohim yunu 2017). Bentuk partisipasi bisa aktif, seperti ikut kampanye, berdiskusi politik, atau menjadi anggota partai, atau pasif seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu. Menurut teori ini, tingkat partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh seberapa baik mereka memahami fungsi dan arti politik itu sendiri. Jadi, partisipasi politik, terutama perilaku memilih pemilih pemula, menunjukkan sejauh mana pemahaman politik mereka. Dalam konteks penelitian, pemahaman politik berperan sebagai dasar pengetahuan yang memengaruhi emosi dan tindakan dalam perilaku politik pemilih pemula.

Orang yang memiliki pemahaman politik tinggi cenderung memiliki perspektif positif tentang pentingnya pemilu, lebih mampu menilai kualitas calon pemimpin, serta lebih aktif dalam kegiatan politik. Sebaliknya, orang dengan pemahaman politik rendah cenderung pasif, tidak peduli, atau mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel ini berjalan secara langsung dan logis:

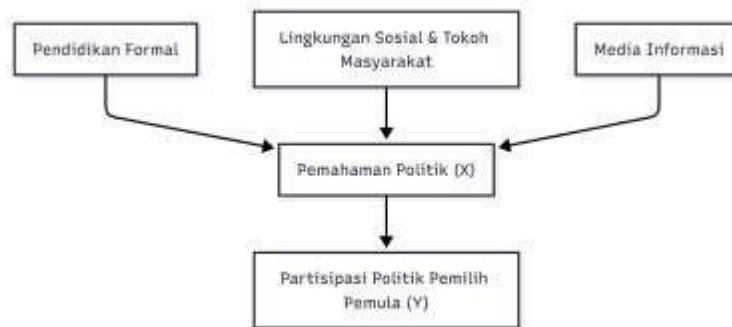
semakin baik pemahaman politik seseorang, semakin baik tindakan politik yang mereka tunjukkan.

Namun hubungan ini tidak berjalan sendiri, proses pembentukan pemahaman politik selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pendidikan, media, dan pengalaman sosial. Di sini, teori sosialisasi politik menjelaskan bagaimana nilai dan pendirian politik ditransfer dari lingkungan ke individu. Misalnya, pemilih muda yang sering berdiskusi politik di keluarga atau terlibat dalam kegiatan organisasi di sekolah memiliki pemahaman politik yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki pengalaman tersebut. Pemahaman politik yang terbentuk kemudian memengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan politik yang rasional dalam Pemilu 2024.

Di sisi lain, teori partisipasi politik juga menjelaskan mengapa pemahaman politik tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata. Ada kasus di mana seseorang memahami politik dengan baik namun memilih tidak berpartisipasi karena sikap apatis, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau kondisi sosial tertentu (Sagala 2018). Karena itu, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hubungan langsung antara pemahaman politik dan perilaku memilih, tetapi juga menggambarkan konteks sosial yang bisa memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Hubungan antara cara seseorang memahami politik dan tindakannya saat memilih dijelaskan melalui tiga tahap berpikir yang logis. Tahap pertama, pemahaman politik membentuk kesadaran politik, yakni sejauh mana seseorang mengenali sistem serta proses dalam politik. Tahap kedua, kesadaran politik ini melahirkan orientasi politik, yaitu sikap dan pandangan seseorang terhadap isu politik serta peran warga negara dalam hal tersebut. Tahap ketiga, orientasi politik ini kemudian berujung pada tindakan nyata dalam politik, termasuk keputusan untuk memilih. Ketiga tahap ini saling terkait secara hierarkis, membentuk alur berpikir yang menyebabkan hubungan antara variabel X dan Y.

Jadi, kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman politik melalui pendidikan formal, sosialisasi, dan paparan informasi politik akan memengaruhi cara berpikir, sikap, dan tindakan pemilih pemula saat menghadapi Pilpres 2024. Pemilih pemula yang memahami politik dengan baik cenderung memilih secara lebih rasional dan bertanggung jawab, sedangkan mereka yang kurang memahami politik lebih mudah terpengaruh oleh emosi atau tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, teori sosialisasi politik menekankan bahwa lingkungan sosial memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh pemahaman politik terhadap tindakan pemilih. Contohnya, jika lingkungan sosial mendukung diskusi politik yang sehat dan terbuka, individu yang paham politik akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Sebaliknya, dalam lingkungan yang tidak peduli terhadap politik, pengaruh pemahaman politik bisa melemah karena tidak ada dorongan sosial untuk mengubah pemahaman itu menjadi tindakan nyata.

Dalam penelitian ini, pemahaman politik dipandang sebagai pengetahuan yang didapatkan melalui proses sosialisasi politik dan pendidikan politik. Sementara itu, perilaku memilih pemula dianggap sebagai hasil dari pemahaman tersebut dalam bentuk partisipasi politik nyata. Jadi, penelitian ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara pemahaman politik dan perilaku memilih. Semakin tinggi pemahaman politik, semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan kualitas perilaku memilih pemilih pemula di Desa Banyumurmi. Secara konseptual, penelitian ini juga berupaya memperdalam pemahaman teoretis tentang pentingnya literasi politik bagi generasi muda Indonesia. Dalam jangka panjang, peningkatan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula dapat memperkuat dasar partisipasi demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel, tetapi juga bisa memberikan masukan dalam membangun strategi pendidikan politik di tingkat daerah dan nasional.



Gambar 1.4 Kerangka berpikir

Sumber : diolah oleh peneliti,2025

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara pemahaman politik, literasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, dan tingkat partisipasi pemilih pemula di Pilpres 2024 di Desa Banyumurmi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Diagram ini menunjukkan bahwa pemahaman politik menjadi awal dari proses bagaimana pemilih pemula memahami, menilai, dan bertindak dalam kegiatan politik. Pemahaman politik artinya kemampuan seseorang untuk mengenali sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta peran lembaga-lembaga dalam politik. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pemilih pemula dalam membentuk sikap dan arah politik mereka. Pemilih pemula adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, biasanya dari usia 17 sampai 21 tahun. Di tahap ini, orientasi politik mereka masih dalam proses pembentukan dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan media. Pemahaman politik yang mereka miliki akan memengaruhi cara mereka merespons topik politik dan memilih secara rasional.

Literasi politik juga berperan penting dalam pemahaman politik. Literasi politik mencakup tingkat pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan pemilih pemula dalam menganalisis isu dan fenomena politik. Semakin tinggi literasi politik seseorang, semakin besar kemungkinan mereka mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis, bukan hanya emosi atau tekanan sosial. Sosialisasi politik berfungsi sebagai proses membentuk nilai, sikap, dan perilaku politik seseorang. Proses ini bisa

terjadi melalui keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, teman sebaya, dan media sosial. Di Desa Banyumurmi, sosialisasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai tradisional dan pengaruh tokoh masyarakat yang masih kuat. Sosialisasi politik berperan sebagai jembatan antara pemahaman politik dan tindakan nyata dalam partisipasi politik.

Partisipasi politik menjadi bukti nyata dari pemahaman dan sosialisasi politik yang telah dilakukan. Partisipasi ini bisa berupa tindakan aktif, seperti mengikuti diskusi atau mengambil bagian dalam kegiatan kampanye, atau tindakan pasif, seperti memakai hak suara dalam pemilu presiden 2024. Dengan berpartisipasi secara politik, pemilih pemula menunjukkan pendapat mereka dan ikut serta dalam proses demokrasi. Pada akhirnya, seluruh proses ini berujung pada tingkat partisipasi politik, yang mencerminkan seberapa besar pemilih pemula terlibat secara sadar dan bertanggung jawab dalam dunia politik. Semakin baik pemahaman dan literasi politik yang didukung oleh sosialisasi yang efektif, semakin tinggi kualitas partisipasi yang ditunjukkan. Dengan demikian, pemikiran ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman politik memberikan dampak positif terhadap partisipasi politik pemilih pemula, dan hal ini berkontribusi langsung pada penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

F. Hipotesis

Ada pengaruh yang positif antara tingkat pemahaman politik dengan tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Desa Banyumurmi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Hipotesis atau dugaan awal pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis alternatif (H_1)

Tingkat pemahaman politik yang tinggi memiliki dampak positif terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2024. Semakin seseorang memahami politik, semakin

besar kemungkinan ia terlibat dalam pemilihan dengan cara yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

2. Hipotesis alternatif (H_2)

Faktor seperti pendidikan, lingkungan sosial, dan media mempengaruhi tingkat pemahaman politik bagi pemilih pemula di Desa Banyumurmi. Pemilih yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi serta berada dalam lingkungan yang sering membicarakan politik cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik.

3. Hipotesis alternatif (H_3)

Pemahaman politik berfungsi sebagai variabel yang memediasi antara sosialisasi politik dari keluarga, sekolah, dan media dengan partisipasi politik pemilih pemula. Artinya, proses sosialisasi politik meningkatkan partisipasi politik karena memperkuat pemahaman politik.

4. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara tingkat pemahaman politik dengan tingkat partisipasi politik pemilih muda dalam pemilihan presiden 2024 di Desa Banyumurmi.

